

Model Integrasi Tindak Tutur Direktif Dalam Penerapan Pendidikan Ahklaq Mulia dan Karakter Bangsa Bagi Pelajar di SMA

**Oleh:
Mulyani**

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, Jawa Timur

Abstrak

Makalah ini mengkaji model integrasi tindak tutur direktif dalam pendidikan akhlaq mulia dan karakter bangsa bagi pelajar di jenjang Sekolah Menengah Atas. Ahklaq mulia atau budi pekerti atau moralitas, khususnya pada pendidikan formal, saat ini seolah-olah telah hilang dilanda perubahan zaman. Kondisi yang serba dilematis itu diawali dengan terjadinya *krisis moneter* pada pertengahan tahun 1997, yang segera diikuti dengan *krisis ekonomi*, *krisis politik*, *krisis sosial*, dan *krisis kebudayaan* yang berintikan *krisis moral* hingga sekarang. Mengkaji secara lebih cermat dan mendalam mengenai akhlaq mulia atau budi pekerti dan tali-temalnya bukan hanya menarik, tetapi apabila berhasil sangat bermanfaat sebagai acuan dalam menentukan kebijakan bagi lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Permasalahan dalam model ini adalah bagaimanakah model integrasi tindak tutur direktif dalam penerapan pendidikan ahklaq mulia dan karakter bangsa bagi pelajar di SMA. Lokasi pengembangan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Jawa Timur, yang pada tahun pelajaran 2009/2010 memiliki jumlah peserta didik sebanyak 735, tenaga pendidik sebanyak 50 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 20 orang.

Model integrasi melalui tiga tahap, yakni (1) Identifikasi nilai-nilai akhlaq mulia dan karakter bangsa, (2) Klasifikasi tindak tutur direktif, dan (3) verifikasi model integrasi. Hasil dan simpulan dari pengembangan/ inovas model integrasi adalah: (1) Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti, (2) Sekolah telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral, dan (3) Tindak tutur direktif sebagai sarana komunikasi membentuk karakter etika inti dalam wujud kesantunan dan keteladanan.

Kata Kunci: Tindak tutur direktif; akhklaq mulia dan karakter bangsa

PENDAHULUAN

1. Masalah dan arti penting pengembangan/ inovasi

Beberapa tahun belakangan ini kita semua prihatin dengan krisis moral atau budi pekerti yang terjadi dan melanda di hampir semua lini kehidupan. Tata aturan telah dicabik-cabik dengan maraknya kegiatan yang brutal atau

aksi-aksi ketidakpuasaan, berontak dengan melakukan kegiatan-kegiatan anarkis yang sangat merugikan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa budi pekerti atau moral atau akhlaq mulia seolah-olah hilang dilanda perubahan zaman, yang sebenarnya kondisi ini sudah sejak lama diramalkan oleh pujangga Ranggawarsita: “*Bubrah sakathing tata, agung kang ginayuh, asor kang pinanggih*”, (artinya: ‘rusaklah semua tatanan, terlalu muluk yang diidamkan, tetapi hina yang diperoleh’), yang dikenal “zaman Kala Bendu”.

“Kondisi pancaroba yang sedang kita alami adalah sedemikian dahsyat dan sedemikian rumit serba salah tali-temalnya, sehingga belumlah berhasil kita temukan jalan keluar yang efektif. Pancaroba menempatkan kita pada kondisi serba dilematis”. Demikian, sepenggal pernyataan dalam buku Seribu Tahun Nusantara (2000: xv) yang memperkuat “ramalan” Ranggawarsita tersebut. Pernyataan itu, agaknya, benar belaka; bukan hanya terbatas pada waktu diterbitkannya buku itu tahun 2000, melainkan juga sampai kini tahun 2010; bahkan sangat mungkin sampai tahun-tahun dekat mendatang dalam decade pertama abab XXI. Bangsa Indonesia nyata-nyata berada dalam kondisi serba dilematis

Beberapa tumpuan penalaran keutamaan makalah ini sebagai berikut:

- (1) Indonesia yang oleh banyak pihak diakui terpuruk, mengalami krisis hebat berentetan dalam berbagai bidang yang sangat pokok. Mula-mula secara eksplosif muncul *krisis moneter* pada pertengahan tahun 1997, muncul *krisis politik* pada tanggal 21 Mei 1998 yang menimbulkan pergolakan serba berlanjut dengan munculnya *krisis sosial*. Upaya untuk menyelesaikan melalui pemilihan umum disusul penetapan wakil-wakil rakyat yang baru di DPR dan MPR serta penentuan presiden sepanjang tahun 1999 (dari Mei sampai dengan Oktober), nampaklah bagaimana segala cara dihalalkan untuk meraih kekuasaan. Lebih dari 45 partai politik berlomba tanpa sungguh-sungguh mengikuti aturan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Dengan perilaku KKN-nya (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta yang populer dengan “politik dagang sapi”, mereka menampilkan diri sebagai pengidap *krisis kebudayaan* yang berintikan pada *krisis moral*.

- (2) Betapapun dahsyat krisis yang terjadi, bangsa Indonesia haruslah tetap hidup. Sementara itu, dunia semakin berubah berkat kemajuan ilmu dan teknologi dengan komputer yang semakin canggih sebagai penandanya. Indonesia, seperti ratusan Negara lainnya di dunia, tidak dapat lepas dari pengaruh dan akibat perubahan global. Salah satu asset berharga adalah keberadaan sumber daya manusia yang perlu secara terus menerus dipelihara. Mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mendorong terjadinya penghayatan nilai-nilai luhur itu, termasuk didalamnya adalah nilai budi pekerti bangsa atau akhlaq mulia dan karakter bangsa harus menjadi pijakan membangun bangsa ini.
- (3) Sebagian dari kita sulit menyadari bahwa antara *krisis moral* yang dikemukakan pada butir (1) dengan upaya yang serius yang perlu dilakukan untuk membangun karakter bangsa yang dikemukakan pada butir (2) memiliki hubungan yang positif dan bersinergi. Krisis moral, sebagaimana nampak sampai sekarang, cenderung menghancurkan, kontra-produktif, dan meredupkan kehidupan; sedangkan pembangunan sumber daya manusia melalui pembelajaran budi pekerti di pendidikan formal belum sepenuhnya berhasil.
- (4) Lebih khusus, usaha-usaha yang telah diterapkan oleh para pendidik di lembaga pendidikan formal dalam mendidik para siswanya di tingkat Sekolah Menengah Atas tampaknya mengalami problem tersendiri. Pendekatan dan strategi yang telah digunakan oleh para pendidik belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku para pelajar. Beberapa kasus, misalnya masih banyaknya peristiwa penyimpangan perilaku sex dalam pemberitaan di media massa yang telah mencoreng-moreng harkat dan martabat generasi muda. Begitu juga, perilaku yang berkaitan dengan sopan santun dan kejujuran dikalangan pelajar. Masih dijumpai banyaknya pelajar yang kurang santun dalam bertindak tutur terhadap pada guru, orang tua atau pun dengan teman sebayanya.

Terkait dengan apa yang dipaparkan di atas, jelaslah bahwa mengkaji ulang dan studi lebih mendalam dan cermat terhadap hal-hal yang mengenai

budi pekerti atau moralitas dan nilai karakter bangsa bukan hanya menarik tetapi juga, bila berhasil, akan sangat bermanfaat

2. Tujuan

Model pengembangan/inovasi yang dipaparkan dalam makalah ini mencakup masalah utama bagaimanakah model integrasi tindak tutur direktif dalam penerapan metode pendidikan ahklaq mulia dan karakter bangsa pelajar di SMA?

Berdasarkan permasalahan tersebut, secara khusus tujuan paparan makalah ini adalah mendeskripsikan model integrasi tindak tutur direktif dalam penerapan metode pendidikan ahklaq mulia dan karakter bangsa pelajar di SMA.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan makalah ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Tindak tutur direktif sebagai wujud kesantunan berperilaku.
- (2) Karakteristik pelajar pada jenjang SMA
- (3) Strategi pendidikan nilai-nilai budi pekerti bagi pelajar di SMA
- (4) Metode intergrasi tindak tutur direktif ke dalam pendidikan ahklaq mulia

KAJIAN PUSTAKA

1. Tindak tutur direktif sebagai wujud kesantunan berperilaku.

Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertian itu yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan

watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Namun apa yang terjadi di era sekarang? Banyak kita jumpai perilaku para anak didik kita yang kurang sopan, bahkan lebih ironis lagi sudah tidak mau menghormati kepada orang tua, baik guru maupun sesama. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa "watak" dengan "watak" (batuk) sangat tipis perbedaannya. Apabila "watak" bisa terjadi karena sudah dari sononya atau bisa juga karena faktor bawaan yang sulit untuk diubah, namun apabila "watak" = batuk, mudah disembuhkan dengan minum obat batuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelas hal ini tidak dapat terlepas adanya perkembangan atau laju ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang mengglobal, bahkan sudah tidak mengenal batas-batas negara hingga mempengaruhi ke seluruh sendi kehidupan manusia

Menurut Searle (1980:23) dan Leech (1983:104-107) ragam tindak tutur direktif meliputi tindak memerintah, memohon, memberi saran, dan memberi ijin. Dengan demikian, secara pragmatik tindak tutur direktif mencakup maksud perintah, permohonan, pemberian saran, dan pemberian ijin.

Bentuk tindak tutur direktif itu berdasarkan pada konteksnya dapat memiliki fungsi kompetitif (*competitive*), bertentangan (*conflictive*), menyenangkan (*convivial*), atau bekerja sama (*collaborative*). Fungsi kompetitif berupa persaingan dengan tujuan sosial, fungsi konflikatif berupa pertentangan dengan tujuan sosial, dan fungsi menyenangkan berupa penilaian positif dengan tujuan sosial. Sementara itu, fungsi bekerjasama berupa pemeliharaan keseimbangan dan keharmonisan perilaku interaksi dalam konteks sosial budaya tertentu.

Ekspresi tindak tutur direktif merupakan realisasi sikap penutur terhadap tindakan prospektif mitra tutur dan kehendak penutur terhadap tindakan mitra tutur. Dengan demikian, tindak ini merupakan jenis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk membuat mitra tutur melakukan sesuatu baik berfungsi sebagai pengatur tingkah laku maupun sebagai pengontrol mitra tutur dalam bertindak. Hubungan antara prospek dan kehendak penutur

dengan pengatur dan pengontrol mitra tutur inilah yang kemudian menjadi dasar sebuah tindak tutur direktif itu dapat mengemban fungsi *menyenangkan*, *bekerjasama*, *kompetitif* dan *bertentangan*.

Lebih lanjut, Kreidler (1998: 183-194) membagi tiga jenis tuturan direktif, yakni perintah (*command*), permintaan (*request*), dan saran (*suggest*). Sebuah perintah (*command*) dimungkinkan jika penutur memiliki kemampuan untuk mengontrol kepada mitra tutur. Verba yang terdapat pada tuturan ini adalah: memerintah, mengharuskan, diminta, tidak diperbolehkan, dan sebagainya. Sementara itu, permintaan (*request*) adalah bentuk tuturan yang menyatakan penutur “ingin” agar mitra tutur melakukan tindakan yang diinginkan. Verba yang menyatakan permintaan diantaranya: memohon, mengharap, menginginkan, menghendaki, dan sebagainya. Selanjutnya, saran (*suggestion*) adalah tuturan yang dibuat penutur berisi saran atau pendapat atau meminta orang lain memberi pendapat atau saran tentang sesuatu untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Verba yang termasuk saran diantaranya: menasihati, menyampaikan pendapat atau saran, menyarankan, merekomendasikan, mengingatkan, dan sebagainya

2. Prinsip-Prinsip Komunikasi

Dalam interaksi komunikasi suatu percakapan dapat berlangsung efektif manakala antara penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang pengetahuan (*background knowledge*) yang sama terhadap sesuatu yang dipertuturkan. Penutur dan mitra tutur memiliki kesepakatan bersama yang antara lain berupa kontrak yang tidak tertulis bahwa ihwal yang dibicarakan itu saling berhubungan. Realisasi adanya hubungan itu dibuktikan dengan mematuhi dua prinsip utama dalam komunikasi, yakni (a) prinsip kerjasama, dan (b) prinsip sopan-santun dalam bertutur.

Di dalam setiap pertuturan dapat diasumsikan bahwa terdapat kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Suatu tuturan yang disampaikan oleh penutur biasanya dilandasi atau maksud tertentu. Penutur berharap agar mitra tuturnya dengan kemampuan komunikatifnya dapat menangkap maksud yang diungkapkan atau diisyaratkan oleh tuturan yang diartikulasikannya (Wijaya, 1999:7).

(1) Prinsip Kerjasama dalam bertutur

M.A.K. Halliday (1992) menyatakan, dalam studi pragmatik ada dua cabang yang saling berkaitan dengan fungsi bahasa, yakni fungsi interpersonal dan fungsi tekstual. Fungsi interpersonal berkaitan dengan sikap penutur serta pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku mitra tutur. Fungsi tekstual berhubungan dengan cara-cara membangun wacana teks baik lisan maupun tulis. Berdasarkan pada kedua fungsi bahasa ini, Leech (1983) dalam studi pragmatik membedakan menjadi pragmatik interpersonal dan pragmatik tekstual.

Keith Allan (1986) mengungkapkan bahwa bertutur adalah kegiatan yang berdimensi sosial. Seperti halnya kegiatan sosial lain, kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan baik apabila para peserta (penutur dan mitra tutur) terlibat aktif di dalam proses bertutur. Selengkapnya gagasan Keith Allan itu adalah sebagai berikut:

“Speaking to others is a social activity, and like other social activities (e.g. dancing, playing in an orchestra, playing cards or football) it can only take place if the people involved”.

Dijelaskan bahwa agar proses komunikasi antara penutur dan mitra tutur berjalan dengan baik dan lancar, mereka harus dapat saling bekerja sama. Pesan dapat diterima dengan baik pada apabila mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) prinsip kejelasan (*clarity*), (2) prinsip kepadatan (*conciseness*), dan (3) prinsip kelangsungan (*directness*).

Lebih lanjut, Grice (1981:46-53) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi, penutur harus mematuhi empat maksim, yaitu: (a) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), artinya, sampaikan informasi Anda seinformatif mungkin sesuai dengan keperluan dan bicaralah seperlunya saja atau jangan berlebihan; (b) maksim kualitas (*maxim of quality*), yaitu, berikan informasi yang benar, jangan katakan sesuatu yang Anda tidak tahu benar, dan jangan katakan sesuatu yang tidak punya bukti yang cukup; (c) maksim relevansi (*maxim of relevance*), yakni, katakan yang relevan dan bicaralah sesuai dengan permasalahan; dan (d) maksim cara (*maxim of manner*), adalah katakan dengan jelas, hindari ambiguitas, serta bicaralah secara singkat dan padat.

Fungsi utama dari prinsip kerjasama dalam bertutur ini adalah agar penutur dalam bertindak tutur direktif bisa berjalan efektif dan efisien. Efektif maksudnya melakukan pertuturan dengan benar, dan efisien berarti dapat merealisasikan tindak tutur direktif menjadi seinformatif mungkin.

(2) Prinsip Kesantunan dalam Bertutur

Salah satu fungsi komunikasi yang penting yang telah digariskan oleh teori etnografi dan etnometodologi adalah untuk menjaga keberlangsungan hubungan antara para komunikannya (Wardough, 1986, 233). Sejalan dengan ini dapat pula dianalogkan bahwa bahasa yang dipergunakan sebagai alatnya berisi kaidah-kaidah yang sangat rumit yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang bertutur agar hubungan interpersonal para pemakainya terpelihara. Jadi, di dalam komunikasi secara implicit terdapat bagaimana seseorang harus berlaku dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh lawan bicaranya (Wijana, 2004). Lebih lanjut, dinyatakan bahwa untuk menjaga hubungan di antara peserta pertuturan, sekurang-kurangnya ada dua teori, (a) teori *Face Threatening Act* dan, (b) teori *Retorika Interpersonal*.

Teori *face threatening act* berawal dari konsep Goffman (1967:6) tentang muka (*face*) yang kemudian dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987). Adapun yang dimaksud dengan muka di sini adalah harga diri (*self-esteem*) setiap orang yang harus dipertimbangkan oleh setiap peserta pertuturan. Teori ini lebih tepat diterjemahkan dengan teori menjaga perasaan (Wijana, 2004). Berbicara secara santun pada hakikatnya adalah berbicara untuk menjaga perasaan orang lain. Untuk menjaga perasaan itu setiap penutur harus (a) memperhatikan harga diri lawan tutur dengan memperlakukan sebagai orang yang memiliki kedudukan yang sama atau termasuk dalam kelompok pembicara (*insider*), atau (b) memperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kebebasannya dalam bertindak. Bila cara pertama yang ditempuh, penutur dikatakan menerapkan strategi positif (*positive strategy*). Sementara itu, bila cara yang kedua ditempuh, penutur dikatakan menerapkan strategi negatif (*negative strategy*). (Wijana, 2004).

Sedikit berbeda dengan teori *face threatening act*, teori retorika interpersonal Leech (1983) tidak hanya memusatkan perhatian pada lawan tutur (*other*) di dalam beberapa maksimnya juga mempertimbangkan diri sendiri (*self*). Dalam teorinya tentang prinsip kesopanan Leech menggariskan harus dipertimbangkan 6 prinsip oleh peserta pertuturan bila hendak berbicara sopan dengan orang lain. Maksim kesopanan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan maksim-maksim percakapan yang harus dipatuhi di dalam melaksanakan retorika tekstual, seperti maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Maksim percakapan dapat dilanggar dalam upaya mematuhi maksim kesopanan. Yang perlu dipahami di sini bahwa tidak selamanya peserta pertuturan mengutarakan tuturan yang sangat sopan kepada lawan tuturnya. Pengutaraan tuturan itu harus didasarkan pada tiga parameter pragmatik yang ada tiga jumlahnya, yakni (1) jauh dekatnya hubungan penutur dan lawan tutur, (2) status sosial penutur dibandingkan dengan lawan tutur yang bersifat asimetris berdasarkan konteks pertuturan, dan (3) tingkat kedudukan tindak tutur (Wijana, 2004).

Fraser (1990) memberikan empat pandangan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. *Pertama*, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial (*the social norm view*). Pandangan ini menjelaskan bahwa kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu. Apa yang dimaksud dengan santun di dalam bertutur, menurut pandangan ini, dapat disejajarkan dengan etiket berbahasa (*language etiquette*). *Kedua*, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan (*conversational maxim*) dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka (*face-saving*). Di dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur juga dapat dianggap sebagai sebuah kontrak percakapan (*conversational contract*). Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan (*politeness principle*) hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerja sama (*cooperative principle*). Prinsip kesantunan ini mengatur tujuan relasional yang berhubungan erat dengan upaya pengurangan friksi dalam hubungan personal antarmanusia pada

masyarakat bahasa tertentu. *Ketiga*, pandangan kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan (*conversational contract*). Kontrak percakapan itu sangat ditentukan oleh hak dan kewajiban peserta tutur yang terlibat dalam kegiatan bertutur itu. Selain itu, kontrak percakapan juga ditentukan oleh penilaian peserta tutur terhadap faktor-faktor kontekstual yang relevan. Kontrak percakapan juga berkaitan erat dengan proses terjadinya sebuah percakapan. Pandangan kesantunan yang *keempat* menyatakan bahwa kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial (*social indexing*). Indeks sosial yang demikian banyak terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial (*social reference*), honorific (*honorific*), dan gaya bicara (*style of speaking*).

Berkaitan dengan kesantunan, secara ringkas Lakoff (1972) berpendapat bahwa terdapat tiga kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan memiliki ciri santun. Ketiga kaidah itu adalah (1) formalitas (*formality*), (2) ketidaktegasan (*hesitancy*), dan (3) kesamaan atau kesekawanan (*equality*).

Rumusan prinsip kesantunan yang sampai saat ini dianggap lebih komprehensif adalah rumusan Leech (1983), yakni (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*), (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*), dan (6) maksim kesimpatian (*sympathy maxim*).

Pandangan kesantunan Brown dan Levinson (1987) yang kemudian dikenal dengan pandangan 'penyelamatan muka' (*face-saving*). Pandangan ini mendasarkan asumsi pokok pada aliran **Weber** yang memandang komunikasi sebagai kegiatan rasional yang mengandung maksud dan sifat tertentu (*purposeful-rational activity*). Pandangan kesantunan ini juga didasari oleh konsep muka yang dikembangkan Erving Goffman, yakni kesantunan atau penyelamatan muka itu merupakan manifestasi penghargaan terhadap individu anggota suatu masyarakat. Anggota masyarakat sosial umumnya memiliki dua macam jenis muka, yakni (1) muka negative (*negative face*) yang menunjuk kepada keinginan untuk menentukan sendiri

(*self-determinating*) dan (2) muka positif (*positive face*) yang menunjuk kepada keinginan yang disetujui (*being approved*).

Di dalam model kesantunan Leech (1983), setiap unsur maksim interpersonal (*interpersonal maxim*) memiliki skala yang bermanfaat untuk menentukan peringkat kesantunan tuturan. Berikut ini skala kesantunan Leech selengkapnya; (1) *cost-benefit scale: representing the cost or benefit of an act to speaker and hearer*, (2) *Optionality scale: indicating the degree of choice permitted to speaker and/or hearer by a specific linguistic act*, (3) *indirectness scale: indicating the amount of inferencing required of the hearer in order to establish the intended speaker meaning*, (4) *authority scale: representing the status the relationship between speaker and hearer*, (5) *social distance scale: indicating the degree of familiarity between speaker and hearer* (Leech, 1983:123-126).

Kelima macam skala pengukur kesantunan Leech (1983) itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Cost-benefit scale* atau skala kerugian dan keuntungan, menunjuk pada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri penutur akan semakin dianggap tidak santunlah tuturan itu. Dalam pandangan mitra tutur, dapat dikatakan bahwa semakin menguntungkan diri mitra tutur, akan semakin dipandang tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu merugikan diri, si mitra tutur akan dianggap semakin santunlah tuturan itu.
- (2) *Optionality scale* atau skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan memilih bagi si penutur dan si mitra tutur, tuturan tersebut akan dianggap tidak santun.

Berkaitan dengan pemakaian tindak tutur direktif guru, dapat dikatakan bahwa apabila tuturan direktif itu menyajikan banyak pilihan, tuturan akan menjadi semakin santunlah pemakaian tuturan direktif guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

- (3) *Indirectness scale* atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung, maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu.
- (4) *Authority scale* atau skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara keduanya, akan cenderung berkurangnya peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam bertutur itu.
- (5) *Social distance scale* atau skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang dipakai itu.

Sementara itu, dalam model kesantunan Brown dan Levinson (1987) hanya terdapat tiga skala pengukur peringkat kesantunan tuturan. Ketiga skala yang dimaksud ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural yang selengkapnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) *social distance between speaker and hearer*, (2) *the speaker and hearer relative power*, (3) *the degree of imposition associated with the required expenditure of goods or service* (Brown and Levinson, 1987:74). Ketiga model kesantunan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Social distance between speaker and hearer* (skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur) banyak ditentukan oleh perbedaan umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosiokultural. Perbedaan umur antara penutur dan mitra tutur, umumnya didapatkan bahwa semakin tua umur seseorang, peringkat kesantunan dalam bertuturnya akan menjadi semakin tinggi. Sebaliknya, orang yang masih berusia muda umumnya cenderung memiliki peringkat kesantunan yang rendah di dalam kegiatan bertutur. Orang yang berjenis kelamin perempuan umumnya memiliki peringkat kesantunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berjenis kelamin laki-laki.
- (2) *The speaker and hearer relative power* (skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur) didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan mitra tutur. Sebagai contoh, guru di dalam kelas memiliki peringkat kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa.
- (3) *The degree of imposition associated with the required expenditure of goods or service* (skala peringkat tindak tutur atau sering pula disebut dengan *rank rating*) didasarkan atas kedudukan relative tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lainnya. Misalnya, dalam situasi yang sangat khusus, bertamu di rumah seorang wanita dengan melewati batas waktu bertamu yang wajar akan dikatakan sebagai tidak tahu sopan santun dan bahkan melanggar norma kesantunan yang berlaku pada masyarakat tutur itu.

Selanjutnya, menurut Robin Lakoff (1973) menyatakan tiga ketentuan untuk dapat dipenuhinya kesantunan di dalam kegiatan bertutur. Ketiga ketentuan itu secara berturut-turut dapat disebutkan sebagai berikut: (1) skala formalitas (*formality scale*), (2) skala ketidaktegasaan (*hesitancy scale*), dan (3) skala kesamaan atau kesekawanan (*equality scale*). Berikut penjelasannya:

- (1) Skala formalitas (*formality scale*), dinyatakan bahwa para peserta tutur dapat merasa nyaman dalam kegiatan bertutur, tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh. Di dalam

kegiatan bertutur, masing-masing peserta tutur harus dapat menjaga keformalitasan dan menjaga jarak yang sewajarnya antara yang satu dengan yang lainnya.

- (2) Skala ketidaktegasan (*hesitancy scale*) menunjukkan bahwa peserta tutur (penutur dan mitra tutur) dapat merasa nyaman dalam bertutur, pilihan-pilihan bertutur harus diberikan kedua belah pihak. Orang tidak diperbolehkan bersikap terlalu tegang dan terlalu kaku di dalam kegiatan bertutur karena akan dianggap tidak santun.
- (3) Skala kesamaan atau kesekawanan (*equality scale*), menunjukkan bahwa agar bersifat santun, orang haruslah bersikap ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Agar tercapai maksud yang demikian, penutur haruslah dapat menganggap mitra tutur sebagai sahabat. Dengan demikian, rasa persahabatan dan kesejajaran sebagai salah satu prasyarat kesantunan akan dapat tercapai.

Asim Gunarwan dalam makalah yang berjudul *Rasa Kejawaan Pengungkapan Tindak Tutur Pengancam Muka di Kalangan Orang Jawa* menyatakan tentang budaya etnis Jawa yang memiliki prinsip keseimbangan atau asas kerukunan dapat dijabarkan menjadi empat bidal. Keempat bidal ini ialah bidal-bidal *kurmat* (hormat), *andhap-asor* (rendah hati), *empan-papan* (sadar akan tempat) dan *tepa-slira* (tenggang rasa). Dalam perwujudan pemakaian bahasa prinsip-prinsip tersebut senantiasa dijadikan pertimbangan penting bagi penutur dan mitra tutur pada konteks interaksi social.

2. Karakteristik pelajar pada jenjang SMA

Kita harus sadar, bahwa pembentukan karakter dan watak atau kepribadian sangat penting, bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya (tidak bisa ditawar-tawar lagi). Hal ini cukup beralasan. Mengapa mutlak diperlukan? Karena adanya krisis yang terus berkelanjutan melanda bangsa dan negara kita sampai saat ini belum ada solusi secara jelas dan tegas, lebih

banyak berupa wacana yang seolah-olah bangsa ini diajak dalam dunia mimpi. Tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu Pemerintah mengeluarkan pandangan, bahwa bangsa kita akan makmur, sejahtera nanti di tahun 2030. Suatu pemimpin bangsa yang besar untuk mengajak bangsa atau rakyatnya menjadi "pemimpi" dalam menggapai kemakmuran yang dicita-citakan. Oleh karena itu, perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan generasi muda mutlak dilakukan. Salah satu perhatian itu adalah memahami secara lebih mendalam tentang karakteristik perilaku generasi muda, khususnya pelajar yang sedang berusaha membentuk karakternya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan.

Karakteristik yang dapat ditemukan pada diri pelajar SMA adalah pada umumnya berusia 16-19 tahun, usia yang tergolong sebagai masa remaja akhir. Masa ini ditandai oleh berkembangnya berbagai aspek dalam diri siswa, yaitu aspek kognitif, sosial-emosional, dan moral (pedoman pendidikan ahklaq mulia siswa SMA, Dirjen Mandikdasmen, 2009)

(1) **Aspek Kognitif**, dengan ciri utama (a) *berpikir abstrak dan bernalar*.

Pada masa remaja akhir individu dapat diajak untuk berpikir atau bernalar dalam membuat suatu keputusan, dan menentukan hal-hal yang dianggap baik atau buruk yang perlu dilakukan. Individu juga mulai dapat memahami pemikiran-pemikiran abstrak seperti konsep relegius, keadilan, dan norma-norma sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, individu dapat menentukan apa yang harus dilakukan disertai dengan alasan yang mendasari perilaku. (b) *Berkebutuhan untuk mencapai prestasi*. Pencapaian prestasi, baik prestasi di bidang akademis, keterampilan fisik, keterampilan motorik, maupun keterampilan sosial merupakan hal penting pada masa remaja akhir. Pencapaian prestasi dipandang sangat relevan dengan proses penemuan identitas diri dan penerimaan kelompok teman sebaya tentang diri mereka.

(2) **Aspek sosial-emosional**, dengan ciri utama (a) *memahami perasaan yang menyertai perilaku*. Remaja akhir dapat mengungkapkan perasaan yang menyertai perbuatan/ perilaku mereka. Individu tidak hanya mementingkan perasaannya sendiri, tetapi pada waktu bersamaan juga

dapat merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. (b) *Kedekatan pada teman sebaya*. Individu juga memiliki kebutuhan untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya. Teman sebaya menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja akhir. Selain dengan teman sebaya, individu beralih untuk menjadikan nilai-nilai yang dianut teman sebaya sebagai acuan untuk diikuti dalam kehidupan mereka. Pada masa ini adakalanya individu justru menentang nilai-nilai yang dianut oleh orangtua atau orang dewasa lainnya. Menurut Kohlberg (dalam Santroks, 2005) remaja akhir berada pada tahap perkembangan moral yang disebut penalaran konvensional. Pada masa ini individu sudah dapat menentukan perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya (standar internal), yang merupakan nilai-nilai yang dianut orang tua/ lingkungan. Keputusan moral ditentukan berdasarkan pemahaman tentang aturan-aturan sosial, hukum, keadilan dan tanggung jawab. Individu menunjung nilai kejujuran, kasih sayang dan kesetiaan.

- (3) **Aspek moral**, dengan ciri utama (a) *membentuk identitas diri*. Pada masa ini individu sedang mencari jawaban atas pertanyaan “siapa aku”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut individu akan mencoba berbagai peran untuk menemukan peran yang cocok dengan dirinya. Individu juga mencoba mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang saya miliki dan perbuat sebagai individu?” dan “kehidupan seperti apa yang saya inginkan”? (b) *Kebutuhan untuk mandiri*. Pada masa remaja akhir keluarga tidak lagi menjadi lingkungan utama. Individu cenderung untuk melepaskan diri akan ketergantungannya dari keluarga, menuju kepada kemandirian. Hal ini sejalan dengan pembentukan identitas diri dan mencari jawaban mengenai “siapa aku”. (c) *Menentukan tujuan hidup*. Sehubungan dengan pencarian identitas diri, maka berbagai kegiatan yang dipilih untuk mengisi waktu menjadi sarana untuk menentukan tujuan hidup.
- (4) **Aspek perilaku**, pada masa ini individu tidak lagi bertindak semata-mata atas pengaruh dari luar seperti adanya hukuman atau hadiah yang akan

diterima sebagai konsekuensi dari tindakan/ perilakunya. Individu sudah mulai memiliki acuan yang berasal dari dalam diri sendiri (acuan internal). Melalui perkembangan dalam kehidupannya dari kecil hingga masa remaja akhir dalam diri individu sudah mulai terdapat nilai-nilai tentang baik dan buruk yang terinternalisasi dalam dirinya.

3. Strategi pendidikan nilai-nilai budi pekerti bagi pelajar di SMA

Untuk mencapai hasil yang optimal, pelaksanaan pendidikan akhlaq mulia dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Untuk menerapkan pendidikan akhlaq mulia bagi siswa SMA, beberapa prinsip dan pendekatan berikut di bawah ini di pandang penting untuk dijadikan dasar pelaksanaan.

(1) Penjernihan terhadap nilai-nilai akhlaq mulia

Dengan melakukan penjernihan terhadap nilai-nilai akhlaq mulia, siswa diarahkan untuk dapat mampu mengenali nilai-nilai akhlaq mulia yang ada pada dirinya dan nilai-nilai akhlaq mulia yang dimiliki orang lain. Di samping itu dengan melakukan penjernihan terhadap nilai-nilai akhlaq mulia, siswa diajak untuk mengkomunikasikan secara terbuka kepada orang lain tentang nilai-nilai akhlaq mulia yang ada pada dirinya, dan mampu berpikir secara rasional dalam menilai nilai akhlaq mulia pada dirinya serta perilaku yang sesuai dengan nilai akhlaq mulia yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk penjernihan terhadap nilai akhlaq mulia, misalnya, *permainan peran, simulasi, dan diskusi kelompok*.

(2) Penanaman nilai

Siswa diajak untuk mengenal serta menilai nilai-nilai universal yang berlaku, dan kemudian menentukan serta menerapkan nilai akhlaq mulia yang sesuai untuk dijadikan bagian dari pribadinya. Dalam penamaan nilai ini, siswa juga diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dalam menentukan dan memilih nilai akhlaq mulia bagi dirinya. Penanaman nilai dapat dilakukan melalui keteladanan, simulasi dan bermain peran.

(3) Melakukan dan berbuat langsung melalui pengalaman

Nilai-nilai akhlaq mulia akan lebih mudah dikembangkan dan diinternalisasikan ke dalam pribadi siswa bila siswa diajak untuk melakukan serta mengalami langsung nilai-nilai akhlaq mulia sebagai dasar untuk berperilaku di masyarakat. Dengan mengalami langsung maka siswa akan menemukan sendiri nilai akhlaq mulia yang paling tepat untuk dirinya setelah ia menjalani proses mengenali, menilai dan membuat keputusan sehubungan dengan nilai akhlaq mulia tersebut. Cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan proyek sosial sekolah untuk berhubungan dengan masyarakat lain yang berbeda karakter kehidupan siswa (bakti sosial, *live in*, kunjungan lapangan).

(4) Pengutamakan kepada kepentingan siswa

Pembinaan akhlaq mulia yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan siswa di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa dalam merancang dan melaksanakan pendidikan akhlaq mulia karakteristik siswa serta keterlibatan mereka menjadi faktor penting. Program pendidikan yang sesuai dengan minat dan cara-cara yang digunakan siswa merupakan bentuk program pendidikan akhlaq mulia yang tidak sesuai dengan minat dan cara-cara yang digunakan siswa. Dalam hal ini siswa SMA, pada umumnya mereka menyukai kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman sebaya dan yang bersifat tidak formal. Untuk itu pendidikan akhlaq mulia yang dikembangkan bersama siswa dipandang akan lebih sesuai dengan minat dan karakteristik siswa.

4. Metode intergrasi tindak tutur direktif ke dalam pendidikan akhlaq mulia

Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu menyambung kembali hubungan dan *educational networks* yang mulai terputus tersebut. Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan.

Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih

diberdayakan. Sebagaimana disarankan Philips, keluarga hendaklah kembali menjadi *school of love*, sekolah untuk kasih sayang (Philips, 2000) atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang (keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah). Sementara itu, pendidikan karakter melalui sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan (*prizing*) kepada yang berprestasi, dan hukuman kepada yang melanggar, menumbuhkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discowaging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk. Selanjutnya menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*characterbase education*) dengan menerapkan ke dalam setiap pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk mendidik karakter, seperti; pelajaran Agama, Sejarah, Moral Pancasila dan sebagainya.

Apabila kita cermati bersama, bahwa desain pendidikan yang mengacu pada pembebasan, kesadaran dan kreativitas sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh para pendidik kita, seperti Ki Hajar Dewantara, KH. Ahmad Dahlan, Prof. HA. Mukti Ali. Ki Hajar Dewantara misalnya, mengajarkan praktek pendidikan yang mengusung kompetensi/kodrati alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan "tuntunan" bukan "tontonan". Sangat jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan "among" yang lebih menyentuh langsung pada tataran etika, perilaku yang tidak terlepas dengan karakter atau watak seseorang. KH. Ahmad Dahlan berusaha "mengadaptasi" pendidikan modern Barat sejauh untuk kemajuan umat Islam, sedangkan Mukti Ali mendesain integrasi kurikulum dengan penambahan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun mengapa dunia pendidikan kita yang masih berkutut dengan problem internalnya, seperti penyakit dikotomi, profesionalitas pendidiknya, sistem pendidikan yang masih lemah, perilaku pendidiknya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda, mulai dari

lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat dengan meneladani para tokoh yang memang patut untuk dicontoh. Oleh karena itu, satu bentuk metode integrasi yang efektif adalah memanfaatkan potensi dan pandangan para tokoh-tokoh tersebut dengan mengusahakan adanya kesantunan dalam berperilaku. Salah satu diantaranya adalah mengintegrasikan model tindak tutur direktif (memerintah) di lingkungan anak-anak atau pelajar. Dengan model tindak tutur direktif yang baik dan efektif maka dimungkinkan akan terjadi proses meneladani perilaku yang memerintah, yakni orang tua atau guru/pendidik. Dengan demikian usaha untuk menjadikan tontonan menjadi tuntunan atau keteladanan sedikit demi sedikit akan berhasil.

METODE PENGEMBANGAN

Metode pengembangan integrasi tindak tutur direktif dalam penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa yang telah penulis lakukan adalah menggunakan metode pengembangan sebagai berikut:

1. Lokasi Pengembangan

Lokasi pengembangan integrasi tindak tutur direktif dalam pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena penulis sebagai Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah salah satu sekolah di Jawa Timur yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan SMA Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2009 sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSBI). SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada tahun 2009/2010 memiliki peserta didik sebanyak 735 siswa, tenaga pendidik sebanyak 51 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 20 orang. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo beralamatkan di Jalan Batoro Katong No. 6B Ponorogo Jawa Timur.

2. Bentuk Pengembangan

Bentuk pengembangan yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif. Hal ini mempertimbangkan bahwa aspek perilaku yang menyangkut dengan tindak tutur direktif dan pendidikan akhlak

mulia serta karakter bangsa dapat dijelaskan dengan nyata dalam bentuk kata-kata, bukan dengan menggambarkan melalui bagan atau angka-angka statistic. Oleh karena itu, bentuk pengembangan mencakup strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan sebuah model integrasi tindak tutur direktif ke dalam pendidikan akhlaq mulia dan karakter bangsa. Bentuk pengembangan itu diantaranya: melalui kegiatan talkshow, diskusi kelompok kecil, refleksi, simulasi, kunjungan lapangan dan penyelenggaraan lomba.

3. Teknik Pengembangan

Teknik pengembangan yang dilakukan dalam integrasi tindak tutur direktif kedalam pendidikan akhlaq mulia dan karakter bangsa adalah melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data primer terkait dengan identifikasi nilai dan klasifikasi tindak tutur direktif Kepala Sekolah, Guru dan karyawan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Ponorog. Sementara itu, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan verifikasi model integrasi. Secara khusus teknik pengembangan adalah sebagai berikut:

- (1) Tindak tutur direktif dikembangkan sebagai nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik.
- (2) Tindak tutur direktif di integrasi ke dalam definisi 'karakter' secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku.
- (3) Menerapkan integrasi tindak tutur direktif dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter.
- (4) Menciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian.
- (5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tindakan moral.
- (6) Membuat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil.
- (7) Mengusahakan mendorong motivasi diri siswa.

- (8) Melibatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa
- (9) Menumbuhkembangkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter.
- (10) Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
- (11) Melakukan evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Sekolah perlu berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti.

HASIL PENGEMBANGAN

Hasil pengembangan dari model integrasi tindak tutur direktif ke dalam pendidikan akhlaq mulia dan karakter bangsa di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dilakukan secara bertahap. Tahap (1) Identifikasi nilai-nilai akhlaq mulia dan karakter bangsa pelajar SMA, (2) klasifikasi tindak tutur direktif Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3) Verifikasi model integrasi.

1. Tahap identifikasi nilai-nilai akhlaq mulia dan karakter bangsa pelajar SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Dirjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMA Kemendikdas telah menetapkan visi misi dan tujuan sekolah. Dari visi misi dan tujuan sekolah dapat diketahui beberapa prinsip dasar dan nilai-nilai yang akan dikembangkan oleh sekolah. Melalui visi SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, yakni: Memelihara keutuhan moral dan prestasi siswa (*Caring for Moral Integrity and Achievement*) dapat diketahui tentang arah kebijakan pengembangan karakter sekolah. Berdasarkan data hasil wawancara mendalam ditemukan nilai-nilai akhlaq mulia dan karakter bangsa yang menjadi nilai dasar di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi nilai-nilai akhlaq mulia dan karakter bangsa pelajar SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo

No	Nilai akhlaq mulia	Pengertian	Indikator perilaku
1	Jujur	Menyampaikan apa adanya sesuai dengan hati nurani	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak menyontek ▪ tidak berbohong ▪ tidak melakukan manipulasi terhadap fakta yang ada ▪ berkata sesuai dengan yang sesungguhnya ▪ Berani mengakui kesalahan yang diperbuatnya.
2	Disiplin	Taat pada peraturan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menggunakan seragam yang sesuai dan rapi, hadir tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan rumah dan tugas-tugas sekolah tepat waktu ▪ taat pada peraturan lalu lintas
3	Santun	Menunjukkan perilaku interpersonal sesuai tataran norma dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak bicara secara tidak sopan ▪ hormat kepada guru dan teman-teman ▪ memberi salam kepada

		adapt istiadat setempat	guru dan teman-teman <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengucapkan terima kasih ▪ tidak membuat onar di sekolah
4	Rendah hati	Berperilaku yang mencerminkan sifat yang berlawanan dengan kesombongan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berpakaian sederhana ▪ tidak menonjolkan diri dan bersedia mengakui teman yang mempunyai kelebihan
5	Percaya diri	Yakin akan kemampuan diri sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri ▪ berani unjuk diri di depan umum untuk menampilkan keterampilan
6	Mandiri	Tidak tergantung pada orang lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cara dan kemampuan sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain
7	Tanggung jawab	Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, serta berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah lakunya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan standar yang terbaik dan berani mengakui kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan tugas tersebut. ▪ berani menanggung risiko atas apa yang diperbuatnya
8	Kreatif	Menciptakan ide-ide dan karya baru yang bermanfaat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyelesaikan tugas dengan cara yang baru dan mempunyai manfaat bagi orang lain
9	Kerja keras	Menyelesaikan kegiatan atau tugas secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kualitas yang terbaik dan tepat waktu
10	Kerjasama	Melakukan kegiatan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru dengan lebih mengutamakan pencapaian tujuan bersama daripada tujuan pribadi

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ berpartisipasi untuk menyumbangkan pikiran/ uang untuk kegiatan bersama
--	--	--	---

2. Tahap Klasifikasi tindak tutur direktif Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Untuk mengembangkan nilai-nilai dasar tentang akhlaq mulia dan karakter bangsa yang telah ditetapkan oleh SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1, hasil wawancara mendalam dan observasi menunjukkan bahwa sarana komunikasi yang dibangun oleh Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sangat berperan dalam membentuk karakter siswa, yakni pada saat memanfaatkan tindak tutur direktif (tindak memerintah). Beberapa kategori dan tipe tindak tutur direktif yang digunakan oleh warga sekolah dibuat dalam sebuah panduan komunikasi.

Tindak tutur direktif sebagai bagian yang penting dalam komunikasi di sekolah mendasarkan pada misi sekolah, yakni mewujudkan *Effective School*. *Effective school* merupakan sebuah akronim (singkatan) yakni : *Educate with meaningfully, Facility with religious morality, Forming nationalism with global network, Empower social cultural awareness, Commit for excellent service, Threat multiple-intelegence development, Innovative learning process with ICT, Value for integrity of creation, Empathy for school progress ant stakeholders*. Usaha mewujudkan misi adalah dengan mengembangkan sikap dan perilaku teladan dalam bertindak tutur, diantaranya dengan menjalankan tindak tutur direktif yang selalu mengedepankan kesantunan dan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi. Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil temuan frekuensi tindak tutur direktif dalam usaha memenuhi komunikasi antara warga sekolah yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam membina hubungan yang harmonis dengan siswa melalui tindak tutur direktif.

Tabel 2: Klasifikasi Tindak Tutur Direktif Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KATEGORI	TIPE
PERINTAH (<i>Command</i>)	Melarang
	Melarang
	Memperingatkan
	Memerintah
	Menegur
	Mendesak
	Mengharuskan
PERMINTAAN (<i>Request</i>)	Memohon
	Mengharap
	Meminta
	menghimbau
	Mengajak
SARAN (<i>Suggest</i>)	Menasihati
	menganjurkan
	Menawarkan
	Mendorong
	Mempersilakan
	Saran

3. Tahap Verifikasi Model Integrasi Strategi, Nilai, Tindak Tutur Direktif dan Model Pengembangan

Pada tahap verifikasi model integrasi ini usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah khususnya adalah menggabungkan antara strategi, nilai dan tindak tutur direktif dalam konteks tertentu, agar tercipta sebuah kondisi yang memungkinkan pembentukan karakter yang utuh. Utuh yang dimaksud adalah bahwa strategi yang dikembangkan oleh kepala sekolah harus mengarah pada nilai-nilai dasar dari ahklaq mulia dan karakter bangsa. Sementara itu, pembentukan nilai-nilai itu akan terwujud bilamana arah dan bentuk komunikasi yang diciptakan mengedepankan bentuk kesantunan dan prinsip kerjasama dalam bertutur. Hal ini dilakukan karena usaha pembentukan karakter sebagian besar memanfaatkan potensi bahasa dan dipenuhi dengan tindakan komunikasi. Oleh karena itu, keutuhan hubungan antara strategi, nilai, dan tindak tutur direktif perlu dikemas dalam sebuah

model integrasi. Model integrasi ini memanfaatkan berbagai kegiatan, peristiwa atau pun konteks tertentu yang memberikan ruang dan kesempatan pembentukan karakter siswa. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan adanya verifikasi model integrasi dalam bentuk kegiatan yang bervariasi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.

Tabel 3: Verifikasi Model Integrasi Strategi, Nilai, Tindak Tutur Direktif, dan Model Pengembangan

No	Strategi	Nilai	Tindak tutur direktif	Model
1	Penjernihan nilai akhlaq mulia	Jujur Disiplin Santun Rendah hati Percaya diri Mandiri Tanggung jawab Kreatif Kerja keras Kerjasama	PERINTAH (Command)	<i>Bermain peran, simulasi, diskusi kelompok</i>
2	Penanaman nilai	Jujur Disiplin Santun Rendah hati Percaya diri Mandiri Tanggung jawab Kreatif Kerja keras Kerjasama	PERMINTAAN (request)	<i>Keteladanan, simulasi dan bermain peran</i>
3	Kegiatan nyata melalui pengalaman	Jujur Disiplin Santun Rendah hati Percaya diri Mandiri Tanggung jawab Kreatif Kerja keras Kerjasama	SARAN (suggest)	<i>Bakti sosial, kunjungan lapangan</i>

4	Mengutamakan kepentingan siswa	Jujur Disiplin Santun Rendah hati Percaya diri Mandiri Tanggung jawab Kreatif Kerja keras Kerjasama	SARAN (suggest)	<i>Problem solving</i>
---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. Karenanya, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral. Siswa memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai. Siswa belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan mengembangkan keterampilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, dan merefleksikan pengalaman hidup.
2. Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral, untuk menilai apakah segala sesuatu yang berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Pendekatan yang komprehensif menggunakan semua aspek persekolahan sebagai peluang untuk pengembangan karakter. Ini mencakup apa yang sering disebut dengan istilah kurikulum tersembunyi, *hidden curriculum* (upacara dan prosedur sekolah; keteladanan guru; hubungan siswa dengan guru, staf sekolah lainnya, dan sesama mereka sendiri; proses pengajaran; keanekaragaman siswa; penilaian pembelajaran; pengelolaan lingkungan sekolah; kebijakan disiplin);

kurikulum akademik, *academic curriculum* (mata pelajaran inti, termasuk kurikulum kesehatan jasmani), dan program-program ekstrakurikuler, *extracurricular programs* (tim olahraga, klub, proyek pelayanan, dan kegiatan-kegiatan setelah jam sekolah).

3. Tindak tutur direktif sebagai sarana komunikasi membentuk kesantunan dan keteladanan perlu diintegrasikan dalam berbagai strategi dan nilai-nilai ahklaq mulia dan karakter bangsa.

B. Saran

1. Dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dari pengertian itu, yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu diusahakan oleh pemerintah sebuah model pendidikan yang integratif melalui kurikulum yang sistemik.
2. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya generasi muda memiliki peran yang lebih penting dalam proses pembentukan karakter melalui agama dan norma-norma sosial yang dianutnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan bentuk kegiatan kolaboratif antara sekolah dan keluarga terkait dengan pembinaan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alois A. Nugroho, 2000. *Pemikiran Etika yang Jatuh Bangun, dalam Ninok Leksono (Ed) Indonesia Abad XXI*, halaman 485 s.d.494
- Branen, Julia, 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cetakan ke-3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin Salam, 2000. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta:

- Deddy Mulyana, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Ditjen Dikdasmen, 2000. *Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Dikdasmen
- Eco, Umberto, 1979. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University press.
- Franz Magnis-Suseno, 1995. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Cetakan ke-6 Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Harsja W.Bachtiar, 1986. *Percakapan dengan Sidney Hook tentang Empat Masalah Filsafat: Etika, Idiologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- H B Acton, 2003. *Dasar-Dasar Filsafat Moral, Elaborasi Terhadap Pemikiran Immanuel Kant*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Jakob Oetama, 2000. *Kata Pengantar: melinium Baru dan Pancaroba Serba dilemma*, dalam Kristanto (Ed), *Seribu Tahun Nusantara*, halaman xi s.d. xviii.
- Nurul Zuriah, 2007. *Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Paul Suparno (Ed). 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah; Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius
- Risieri Frondizi, 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto, 1994. *Pemanfaatan Potensi Bahasa. Kumpulan Karangan Sekitar dan Tentang Satuan Lingual Bahasa Jawa yang Berdaya Sentuh Inderawi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2000. *Bahasa Jawa sebagai Salah Satu Wahana Pendidikan Budi Pekerti*, makalah disajikan pada Sarasehan Budi Pekerti yang diselenggarakan oleh Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terpanya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

